

Memetakan model kompetisi Pilkada DIY

Oleh Sumarto
DOSEN FISIPOL UIW

Tak lama lagi, tepatnya 23 Mei 2010 pesta demokrasi tingkat lokal, pemilihan kepala daerah langsung (Pilkada) akan digelar di tiga wilayah di DIY, yakni Sleman, Bantul, dan Gunungkidul. Saat ini segala persiapan tengah dilakukakan secara serius oleh masing-masing penyelenggara Pilkada di ketiga daerah tersebut. Tak bisa dipungkiri isu Pilkada akan mendapat perhatian publik yang tinggi.

Namun demikian ada fenomena menarik terkait dengan hasil survei yang dilakukan *Harian Jogja* (31/1) perihal pengetahuan dan kecenderungan publik untuk memilih calon kepala daerah yang akan bertarung pada Pilkada 2010 di tiga kabupaten tersebut.

Kendati belum memasuki tahapan pencalonan yang *free*, namun dinamika serta kemungkinan yang akan terjadi dalam Pilkada 2010 sudah dapat diprediksi dengan melihat data sekunder tersebut. Tulisan ini hendak mengupas fenomena unik hasil jajak pendapat *Harian Jogja* tersebut.

Model persaingan

Hasil survei *Harian Jogja* yang menanyakan responden seputar calon yang akan dipilih memaparkan bahwa Pilkada yang paling seru akan terjadi di Sleman dibandingkan dua kabupaten lainnya.

Terlepas dari dinamika yang masih mungkin terjadi, fakta menunjukkan peluang antar calon kepala daerah terlihat berkembang. Pensi *incumbent* yang dimiliki wakil bupati tidak begitu dominan karena masih bisa tersaingi oleh kandidat lain yang cukup populer. Namun demikian, angka yang telah menyatakan pilihannya tersebut hanya mencapai 23,70%, karena responden yang menyatakan tidak tahu sebesar 76,30%.

Sementara itu, hasil survei menunjukkan gejala yang berlawanan terjadi di Bantul. Pensi *incumbent* tampak sangat kuat, serta belum banyak muncul nama-nama baru calon kepala daerah. Hal ini juga didukung dengan tingginya persentase yang telah menyatakan

pilihannya yaitu sebesar 46,20%, karena responden yang menyatakan tidak tahu atau belum menentukan pilihannya sebesar 53,80%.

Sedangkan kondisi persaingan Pilkada di Gunungkidul menunjukkan gejala yang berbeda lagi. Persaingan kandidat di wilayah ini diwarnai oleh polarisasi *incumbent* yang diramalkan oleh kuda hitam. *Incumbent* di Gunungkidul terbelah, setelah Bupati dan Wakil Bupati menyatakan akan maju sendiri dengan kendaraan masing-masing, sehingga kekuatan antar calon diprediksikan berimbang. Namun demikian, angka yang telah menyatakan pilihannya tersebut baru mencapai 22,50%, karena responden yang menyatakan tidak tahu sebesar 77,50%.

Berangkat dari ketiga gejala hasil survei tersebut, dapat disusun tiga kategori model persaingan Pilkada, yaitu model persaingan bebas, model dominasi, serta model polarisasi. Model persaingan bebas ditandai dengan tidak dominannya calon *incumbent*. Persaingan terjadi antar banyak calon yang terdiri atas *incumbent* dan beberapa calon populer.

Kondisi ini bisa terjadi karena faktor kegagalan calon *incumbent* atau keterlibatan untuk menggunakan *tim* *layak* dan memanfaatkan posisinya untuk menarik keuntungan pada pelaksanaan Pilkada yang terbelah masih membuka peluang baginya. Di samping itu, faktor munculnya pesaing-pesaing populer dan kandidat-kandidat baru juga meramalkan bursa persaingan yang ada. Implikasi dari terjadinya persaingan bebas ini adalah kemungkinan terjadinya perebutan suara yang merata antar calon yang berdaya.

Dengan demikian kemungkinan terjadinya Pilkada putaran kedua sangat mungkin terjadi. Keayaan model ini

terletak pada banyaknya alternatif calon yang potensial, sehingga publik memiliki banyak pilihan agar bisa berjarang calon yang memang benar-benar berkualitas dan mampu melakukan marketing dirinya secara efektif.

Kelemahannya terletak pada sisi pembiayaan yang besar, karena kemungkinan terjadinya Pilkada tahap kedua. Di samping itu juga potensi konflik yang tinggi yang bersumber dari kekecewaan salah satu pihak mengingat kompetisi yang ketat akibat selisih perolehan suara yang sangat kecil.

Sementara model dominasi ditandai dengan kuatnya posisi calon *incumbent*, sehingga tidak memunculkan banyak alternatif calon yang kuat. Kondisi ini bisa terjadi karena faktor kesuksesan calon *incumbent* untuk menggunakan mesin politik dan mampu memanfaatkan posisinya untuk menarik keuntungan pada pelaksanaan Pilkada.

Calon-calon penantang yang akan berdaya biasanya banyak pertimbangan untuk menantang *incumbent*, sehingga kemungkinan akan terhambat untuk dapat melakukan *sentimental* pencalonannya. Pasangan calon penantang mesti melakukan kerja keras untuk dapat mengungguli *incumbent*, dengan mengorchestrasi mesin politik dan memanfaatkan momentum.

Implikasi dari model dominasi ini adalah kemungkinan terjadinya persaingan calon kepala daerah tunggal, karena hanya yang "terlambat panas" akan menyoal waktu dengan strategi *martha da* *perencanaan* di KPU. Dengan hanya ada calon tunggal, maka tahapan Pemilu pasti akan lancar. Namun jika ada persaingan lain yang maju, maka sangat mungkin Pilkada terjadi dalam satu putaran, mengingat terbatasnya pasangan calon yang ada.

Kelebihan dari model dominasi ini terletak pada efisiensi pengalangan uang

aran Pilkada, karena hanya akan terjadi satu putaran. Di samping itu, potensi konflik relatif lebih rendah dibandingkan model pertama, karena masih dominannya *incumbent* beserta mesin politik maupun yang mendukungnya. Sedangkan kelemahannya terletak pada alternatif pilihan pasangan calon yang ada. Publik tidak memiliki banyak alternatif.

Sedangkan model polarisasi ditandai dengan adanya persaingan antar *incumbent* yang maju bersama-sama dengan kendaraan politik yang berbeda. Kondisi ini bisa terjadi karena bupati *incumbent* dan wakil bupati *incumbent* maju bersaing dalam Pilkada, sementara calon pesaing lainnya yang muncul belum begitu populer.

Fenomena ini merupakan fenomena umum konsolidasi dari ketidaksolidan pasangan bupati-wakil bupati sebagai paket bersama, namun berbeda kebijakan setelah menjabat. Koron hal ini akan menjadi bahan revisi bagi UU Pemerintah Daerah yang akan mengubah pencalonan kepala daerah dan wakilnya secara signifikan. Implikasi dari model ini adalah akan terjadi persaingan ketat terhadap *incumbent*, sehingga akan terjadi Pilkada tahap kedua jika calon non *incumbent* cukup populer. Sedangkan apabila tidak muncul calon populer, maka tahapan akan langsung satu putaran.

Keunggulan model ini terletak pada adanya alternatif pilihan pasangan calon yang berpengalaman, artinya masing-masing calon berpengalaman pada masa kepemimpinan sebelum. Sedangkan kelemahannya terletak potensi konflik yang tinggi yang masing-masing memiliki pendukung sama besar, serta potensi persaingan dan memanfaatkan posisi sama-sama strategis.

Dari ketiga model yang akan ditarik adanya perang mawapun model persaingan ini akan kemenangan pasangan letak pada mesin politik yang kualitas sumberdaya calon kemampuan memanfaatkan m. Akhirnya, marilah kita tinggangan yang akan terjadi. Pilkada di DIY dapat berjalan demokratis dan berkeadilan.

